



**BANK SYARIAH  
ANNISA MUKTI**  
PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah



# LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA TAHUN 2025

📷 [annisamukti.official](#)

🌐 [annisamukti.co.id](#)

Jl. Letjend Suprpto 12-C  
Kepuhkiriman, Waru, Sidoarjo  
**WA. 0815 5656 0651**





## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	BPR SYARIAH ANNISA MUKTI
Alamat	Jl. Letjen Suprpto No 12C Kepuhkiriman, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo Jawa Timur
Nomor Telepon	0318673930
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	018
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	10 Juli 2025
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	003
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	23 Januari 2026

### Penjelasan Umum:

Bank Perekonomian Rakyat Syariah Annisa Mukti (BPR Syariah Annisa Mukti) memiliki komitmen kuat dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan standar tata kelola yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Komitmen ini bertujuan agar BPR Syariah Annisa Mukti dapat tumbuh dengan baik dan berkelanjutan serta memiliki daya saing di industri perbankan terutama di Bank Perekonomian Rakyat, khususnya di wilayah kerja BPR Syariah Annisa Mukti yang meliputi Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik didukung oleh integritas tinggi melalui proses internal yang melibatkan seluruh organ perseroan di setiap tingkatan organisasi. Peran Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sangat sentral dan signifikan dalam memastikan implementasi tata kelola dapat berjalan secara efektif di lingkungan BPR Syariah Annisa Mukti.

Dengan pengalaman operasional lebih dari 15 tahun, BPR Syariah Annisa Mukti secara konsisten menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Hal ini sejalan dengan komitmen bank dalam mewujudkan visinya sebagai penyedia layanan jasa perbankan yang terpercaya, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh sumber daya insani yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi nasabah BPR Syariah Annisa Mukti. Dalam implementasinya, BPR Syariah Annisa Mukti mengacu pada tiga aspek utama tata kelola, yaitu struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola. Ketiga aspek yang menjadi fokus utama dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG) untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

### Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<b>2. Baik</b>
--	----------------

### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:



Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPR Syariah Annisa Mukti adalah 2 (Sehat). Secara umum, kondisi bank dinilai sehat dan mampu menghadapi potensi pengaruh negatif yang signifikan akibat perubahan kondisi bisnis maupun faktor eksternal lainnya. Hal ini tercermin dari penilaian terhadap faktor-faktor utama, seperti profil risiko, penerapan tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, yang secara keseluruhan berada dalam kategori baik. Apabila terdapat kelemahan, baik dari sisi internal maupun eksternal, dampaknya relatif tidak signifikan. Dari aspek struktur dan infrastruktur, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta wewenang Direksi dinilai masih terpenuhi sebagian. Demikian pula, fungsi kepatuhan menunjukkan kondisi yang masih terpenuhi Sebagian. Sementara itu, proses penerapan tata kelola dinilai telah berjalan efektif dan efisien, didukung oleh struktur organisasi yang memadai. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah juga menunjukkan kondisi yang memadai

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Khaerul Hamdani, S.Kom
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b> Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan prinsip syariah. Termasuk memastikan kegiatan usaha BPRS berjalan sehat, aman, dan sesuai regulasi yang berlaku, berikut Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi : <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengelola BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPRS Annisa Mukti dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>• Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.</li><li>• Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Internal atau Pejabat Eksekutif Audit Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.</li><li>• Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPRS, auditor ekstem, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain.</li><li>• Direksi wajib membentuk satuan kerja atau menunjuk pejabat dalam melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan kepatuhan serta APUPPT &amp; PPPSPM.</li><li>• Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, dengan adanya pemisahan tanggungjawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional.</li><li>• Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</li><li>• Menyiapkan Rencana Jangka menengah dan jangka Panjang Perseroan, Rencana Bisnis Bank dan rencana kerja lainnya.</li></ul>	

### Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS:

Tidak lanjut seluruh rekomendasi pengawasan dari Dewan Komisaris telah dilaksanakan untuk pencapaian kinerja dengan meningkatkan kompetensi serta penyesuaian struktur organisasi agar target dapat tercapai sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah di tetapkan. Direksi telah melaksanakan strategi-strategi yang tepat dan tetap mempertahankan keberhasilan dalam menjaga tingkat kesehatan bank serta tetap menciptakan suasana kerja yang kondusif.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi mengelola BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Bambang Eko Wahono, S.E
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b> Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di setiap tingkatan organisasi. Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>• Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diterapkan secara konsisten dalam seluruh kegiatan usaha BPRS di semua jenjang organisasi,</li><li>• Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPRS dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS</li><li>• Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi</li><li>• Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit/Pejabat Eksekutif Audit Internal, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain</li><li>• Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional BPRS kecuali terhadap Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan batas maksimum penyaluran dana (BMPD),</li><li>• Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta Keadaan atau potensi kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS.</li></ul>	
2.	Nama	Gusti Abdurrahman, S.E
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b> Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di setiap tingkatan organisasi. Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>• Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diterapkan secara konsisten dalam seluruh kegiatan usaha BPRS di semua jenjang organisasi,</li><li>• Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPRS dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS</li><li>• Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi</li><li>• Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit/Pejabat Eksekutif Audit Internal, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain</li><li>• Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional BPRS kecuali terhadap Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai ketentuan batas maksimum penyaluran dana (BMPD),</li><li>• Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat</li></ul>	



pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta Keadaan atau potensi kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS.

#### Rekomendasi Kepada Direksi:

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi BPR Syariah Annisa Mukti berfokus pada pengawasan, penguatan tata kelola (GCG), manajemen risiko, dan pencapaian target bisnis sesuai peraturan OJK. Rekomendasi wajib ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja, termasuk tindak lanjut temuan audit, evaluasi kebijakan strategis, dan persetujuan perubahan prosedur internal, berikut rekomendasi Dewan komisaris untuk Direksi :

- Memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola, termasuk tindak lanjut temuan audit atau pemeriksaan,
- Memberikan masukan dan rekomendasi aktif terkait pencapaian target BPRS yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB),
- Memastikan kepada direksi untuk segera memperbaiki kelemahan yang ditemukan oleh pelaksana audit internal atau pemeriksa eksternal,
- Memberikan rekomendasi atau persetujuan atas perubahan kebijakan internal.

#### 4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota DPS

1.	Nama	Drs. Akh Mukarram M.Hum
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah Annisa Mukti dengan itikad baik</li><li>• Dewan Pengawas Syariah wajib memberikan saran dan nasihat kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPR Syariah Annisa Mukti agar sesuai dengan prinsip Syariah.</li><li>• Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah Annisa Mukti.</li><li>• Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.</li><li>• Dewan Pengawas Syariah wajib menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah pada standar operasioanal prosedur dan produk yang dikeluarkan BPR Syariah Annisa Mukti.</li><li>• Dewan Pengawas Syariah wajib mengawasi pengembangan produk baru dan/atau aktivitas baru agar sesuai dengan fatwa dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI – DSN MUI</li></ul>	
2.	Nama	DR HM Sukron Djazilan S.Ag. M.Pd.I
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah Annisa Mukti dengan itikad baik</li><li>• Dewan Pengawas Syariah wajib memberikan saran dan nasihat kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPR Syariah Annisa Mukti agar sesuai dengan prinsip Syariah.</li><li>• Dewan Pengawas Syariah bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah Annisa Mukti.</li><li>• Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas</li></ul>	



temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.

- Dewan Pengawas Syariah wajib menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah pada standar operasional prosedur dan produk yang dikeluarkan BPR Syariah Annisa Mukti.
- Dewan Pengawas Syariah wajib mengawasi pengembangan produk baru dan/atau aktivitas baru agar sesuai dengan fatwa dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI – DSN MUI

#### **Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi:**

Direksi wajib konsisten dalam menerapkan prinsip syariah terhadap seluruh produk yang dimiliki, termasuk dalam pengembangan maupun aktivitas produk baru BPR Syariah Annisa Mukti. Setiap inovasi dan kegiatan usaha harus tetap mengacu pada ketentuan dan nilai-nilai syariah. Selain itu, Direksi juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang selaras dengan prinsip syariah. Penerapan tersebut harus didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha BPR Syariah.

### **5. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

#### **Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:**

PT BPRS Annisa Mukti saat ini belum memiliki komite-komite. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan tetap dilakukan secara langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **6. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

#### **Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:**

BPR Syariah Annisa Mukti saat ini belum memiliki keanggotaan komite, sehingga aspek keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite belum dapat diimplementasikan.

### **7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dewan Komisaris, dan DPS pada BPR Syariah**

#### **Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Syariah**

1.	Nama	Khaerul Hamdani, S.Kom
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

#### **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah**

1.	Nama	Bambang Eko Wahono, S.E
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Gusti Abdurrahman, S.E
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

#### **Kepemilikan Saham Anggota DPS pada BPR Syariah**

1.	Nama	Drs. Akh. Mukarram, M. Hum
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



2.	Nama	DR HM Sukron Djazilan S.Ag. M.Pd.I
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki kepemilikan saham pada PT. BPRS Annisa Mukti. Kondisi ini mencerminkan independensi seluruh organ perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta meminimalkan potensi benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

## 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR Syariah

### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR Syariah

1.	Nama	Khaerul Hamdani, S.Kom
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak ada kepemilikan saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR Syariah

1.	Nama	Bambang Eko Wahono, S.E
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak ada kepemilikan saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Gusti Abdurrahman, S.E
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak ada kepemilikan saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

### Kepemilikan Saham Anggota DPS pada Kelompok Usaha BPR Syariah

1.	Nama	Drs Akh Mukarram, M.Hum
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak ada kepemilikan saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	DR HM Sukron Djazilan S.Ag. M.Pd.I



Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak ada kepemilikan saham
Persentase Kepemilikan (%)	0,00
Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

#### Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

1.	Nama	Tjie steffen sebastian
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak ada kepemilikan saham pada Kelompok Usaha
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Edwin Suryalaksana
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Wiradhana Putramas
	Persentase Kepemilikan (%)	22,35
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	22,35
3.	Nama	Edwin Suryalaksana
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Tamandhana
	Persentase Kepemilikan (%)	20,78
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	20,78
4.	Nama	Gijan Ongkoredjo
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Wiradhana Putramas
	Persentase Kepemilikan (%)	5,25
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	5,25
5.	Nama	Gijan Ongkoredjo
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Tamandhana
	Persentase Kepemilikan (%)	5,05
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	5,05
6.	Nama	Anik Lestari M, S.H
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Wiradhana Putramas
	Persentase Kepemilikan (%)	1,50



	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	1,50
7.	Nama	Anik Lestari M, S.H
	Nama Kelompok Usaha BPR	PT. BPR Tamandhana
	Persentase Kepemilikan (%)	2,16
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	2,16

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta salah satu pemegang saham yaitu Bapak Tjie Steffen Sebastian, tidak memiliki kepemilikan saham pada kelompok usaha PT BPRS Annisa Mukti. Namun demikian, terdapat pemegang saham lain yang memiliki kepemilikan saham pada entitas dalam kelompok usaha PT BPRS Annisa Mukti, yaitu pada PT BPR Wiradhana Putramas dan PT BPR Tamandhana.

#### 9. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS pada Perusahaan Lain

##### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Khaerul Hamdani, S.Kom
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

##### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Bambang Eko Wahono, S.E
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Gusti Abdurrahman, S.E
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

##### Kepemilikan Saham Anggota DPS pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Drs. Akh Mukkaram, M.Hum
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	DR HM Sukron Djazilan S.Ag. M.Pd.I
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BPRS Annisa Mukti tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain, sehingga mencerminkan independensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

#### 10. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Pemegang Saham pada BPR Syariah

##### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Syariah

1.	Nama	Khaerul Hamdani, S.Kom
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan

##### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

1.	Nama	Bambang Eko Wahono, S.E
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
2.	Nama	Gusti Abdurrahman, S.E
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan

##### Hubungan Keuangan Anggota DPS pada BPR Syariah

1.	Nama	Drs. Akh Mulkaram, M. Hum
----	------	---------------------------



	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
2.	Nama	DR HM Sukron Djazilan S.Ag. M.Pd.I
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak ada hubungan keuangan

#### Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR Syariah

1.	Nama	Tjie Steffen Sebastian
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
2.	Nama	Edwin Suryalaksana
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
3.	Nama	Gijan Ongkoredjo
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota	Tidak Hubungan Keuangan



	Direksi Lain di BPR Syariah	
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
4.	Nama	Anik Lestari M, SH
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Hubungan Keuangan

Pemegang Saham, Anggota Direksi dan Anggota DPS tidak memiliki hubungan keuangan (Pembiayaan) dengan BPRS, salah satu dari anggota dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan bank atas fasilitas pembiayaan yang diterima.

#### 11. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Pemegang Saham pada BPR Syariah

##### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Syariah

1.	Nama	Khaerul Hamdani, S.Kom
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada

##### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

1.	Nama	Bambang Eko Wahono, S.E
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada



	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
2.	Nama	Gusti Abdurrahman, S.E
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada

#### Hubungan Keluarga Anggota DPS pada BPR Syariah

1.	Nama	Drs. Akh Mukkaram, M.Hum
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
2.	Nama	DR HM Sukron Djazilan S.Ag. M.Pd.I
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada

#### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR Syariah

1.	Nama	Tjie Steffen Sebastian
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak Ada



	Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
2.	Nama	Edwin Suryalaksana
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
3.	Nama	Gijan Ongkoredjo
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
4.	Nama	Anik Lestari M, S.H
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota DPS Lain di BPR Syariah	Tidak Ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR Syariah	Tidak Ada

Seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, serta Pemegang Saham BPRS Annisa Mukti tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 12. Rangkap Jabatan Anggota DPS

Seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Annisa Mukti tidak memiliki rangkap jabatan pada BPRS lain maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan syariah secara optimal dan independen.

## 13. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

### 1.1. Gaji Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp189.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp192.000.000
Jumlah DPS Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji DPS (Rp)	Rp120.000.000

### 1.2. Tunjangan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp41.742.876
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp17.711.202
Jumlah DPS Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan DPS (Rp)	Rp8.766.400

### 1.3. Tantiem Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang



Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah DPS Penerima Tantiem	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem DPS (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 1.4. Bonus Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Bonus	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Bonus Direksi (Rp)	<b>Rp23.650.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Bonus	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Bonus Komisaris (Rp)	<b>Rp16.000.000</b>
Jumlah DPS Penerima Bonus	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Bonus DPS (Rp)	<b>Rp10.000.000</b>

#### 1.5. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah DPS Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham DPS (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 1.6. Remunerasi lainnya Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	<b>1 orang</b>
--	----------------



Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp1.200.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah DPS Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya DPS (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 2.1. Perumahan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah DPS Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan DPS (Rp)	<b>Rp0</b>

#### 2.2. Transportasi Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	<b>1 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	<b>Rp59.581.842</b>
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah DPS Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi DPS (Rp)	<b>Rp0</b>



### 2.3. Kesehatan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Kesehatan (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Kesehatan Direksi (Rp)	Rp5.760.000
Jumlah Komisaris Penerima Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Kesehatan DPS (Rp)	Rp0

### 2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	1 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0
Jumlah DPS Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya DPS (Rp)	Rp0

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Pengurus BPRS Annisa Mukti telah ditetapkan melalui RUPS, Penetapan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan prinsip kewajaran, kinerja, dan kemampuan keuangan perusahaan, sehingga mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

## 14. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

### 1. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,26 : 1
-------------	----------



2. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b) 1,06 : 1

3. Rasio (a) gaji anggota DPS yang tertinggi dan (b) gaji anggota DPS yang terendah

Rasio (a/b) 1,00 : 1

4. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b) 2,45 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang tertinggi

Rasio (a/b) 0,52 : 1

6. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,34 : 1

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesenjangan remunerasi di dalam organisasi. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total penghasilan pegawai dengan gaji tertinggi terhadap pegawai dengan gaji terendah dalam satu periode tertentu

## 15. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	22 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
1. Evaluasi perkembangan target dan realisasi BPRS Annisa Mukti Triwulan I tahun 2025 Laporan Keuangan Posisi 31 Maret 2025.		
2. Isu – isu stragtegis BPRS pada Triwulan I (Satu) tahun 2025.		
3. Permasalahan Lain di PT BPRS Annisa Mukti pada Triwulan ke I tahun 2025.		
2.	Tanggal Rapat	14 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
1. Evaluasi perkembangan BPRS Annisa Mukti Triwulan II tahun 2025 Laporan Keuangan Posisi 30 Juni 2025.		
2. Isu – isu stragtegis BPRS pada Triwulan II (dua) tahun 2025		
3. Permasalahan Lain di PT BPRS Annisa Mukti pada Triwulan ke II tahun 2025.		
3.	Tanggal Rapat	10 September 2025



	Jumlah Peserta	2 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> a. Pembahasan POJK Nomor 22 Tahun 2023 b. Pemantauan Layanan Pengaduan Nasabah pada PT. BPRS Annisa Mukti c. Literasi dan Inklusi Keuangan	
4.	Tanggal Rapat	22 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	21 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> 1. Evaluasi perkembangan usaha BPRS Annisa Mukti Triwulan III tahun 2025 Laporan Keuangan Posisi 30 September 2025. 2. Isu – isu strategis BPRS pada Triwulan III (Tiga) tahun 2025 3. Permasalahan Lain di PT BPRS Annisa Mukti pada Triwulan ke III tahun 2025.	

Selama periode tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat secara berkala dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi serta untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR Syariah Annisa Mukti berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

## 16. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Bambang Eko Wahono, S.E
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Gusti Abdurrahman, S.E
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu minimal satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Seluruh rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPRS Annisa Mukti.

Pelaksanaan rapat ini menunjukkan komitmen Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

## 17. Pelaksanaan Rapat DPS dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	24 Januari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>	



- a. Evaluasi hasil pengawasan atas kebijakan dan operasional PT. BPRS Annisa Mukti pada Triwulan I tahun 2025 sesuai dengan Prinsip Syariah
- b. Hasil Pemeriksaan secara acak terhadap Akad pembukaan Tabungan, akad pembukaan deposito dan Akad pembiayaan Murabahah.
- c. Lain - lain (Himbauan dan arahan Dewan Pengawas Syariah agar dalam menjalankan tugas operasional dan dalam mengejar target RBB Direksi selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, dan selalu menerapkan prinsip syariah)

2.	Tanggal Rapat	17 April 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2025
2. Evaluasi hasil pengawasan atas kebijakan dan operasional BPRS Annisa Mukti pada Triwulan I tahun 2025 sesuai dengan Prinsip Syariah
3. Lain-lain (tindak Lanjut hasil temuan dari Audit Internal)

3.	Tanggal Rapat	14 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. Laporan Kinerja Direksi BPRS Annisa Mukti
2. Evaluasi operasional BPRS Annisa Mukti pada Triwulan II tahun 2025
3. Produk dan Layanan Baru (Pada triwulan Ke II (Dua) tahun 2025 belum ada aktivitas produk dan layanan baru yang akan diterbitkan, namun demikian apabila ada produk dan layanan baru yang akan diluncurkan oleh BPRS Annisa Mukti, DPS Harus memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah)

4.	Tanggal Rapat	14 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. Laporan Kinerja Direksi BPRS Annisa Mukti
2. Evaluasi operasional BPRS Annisa Mukti pada Triwulan III tahun 2025

Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan minimal 1 (satu) kali dalam 3( tiga) bulan, Pelaksanaan rapat ini merupakan bentuk komitmen Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah serta memastikan seluruh kegiatan usaha BPR Syariah Annisa Mukti berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

## 18. Kehadiran Anggota DPS

### Kehadiran Anggota DPS dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota DPS	Drs. Akh Mukarram M. Hum
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir



2.	Nama Anggota DPS	DR HM Sukron Djazilan S.Ag M.Pd.I
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

BPRS Annisa Mukti memastikan bahwa selama tahun 2025 seluruh rapat Dewan Pengawas Syariah dihadiri secara langsung oleh seluruh anggotanya dan dibuatkan risalah rapat yang di tandatangi bersama, sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan syariah yang optimal

## 19. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

  

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus



Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota DPS

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	<b>0 kasus</b>



Hukum Pada Tahun Laporan

### 1.5. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya **0 kasus**

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan **0 kasus**

Selama periode pelaporan, tidak terdapat penyimpangan internal (internal fraud) pada PT BPRS Annisa Mukti

## 20. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

### 1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) **0 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) **0 kasus**

### 1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian **0 kasus**

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian **0 kasus**

Selama tahun 2025, tidak terdapat perkara penting maupun permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPRS Annisa Mukti. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional BPR Syariah Annisa



Mukti telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan usaha.

## 21. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

1.	Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Gusti Abdurrahman, S.E
	Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Komisaris
	Nama Pengambil Keputusan	Bambang Eko Wahono, S.E
	Jabatan Pengambil Keputusan	Komisaris Utama
	Jenis Transaksi	Pembiayaan Diterima
	Nilai Transaksi	Rp30.000.000
<b>Keterangan:</b> Telah sesuai dengan sistem prosedur kebijakan BPRS		

Pada tahun 2025, terdapat transaksi yang melibatkan pengurus PT BPRS Annisa Mukti, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan kepada salah satu anggota Dewan Komisaris. Meskipun demikian, transaksi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di PT BPRS Annisa Mukti serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi benturan kepentingan, BPR Syariah Annisa Mukti tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam pelaksanaan transaksi tersebut.

## 22. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	25 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan Nurul Hayat
	Penjelasan Kegiatan	Zakat Perusahaan disalurkan melalui Yayasan Nurul Hayat
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	25 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Dompot Dhuafa
	Penjelasan Kegiatan	Zakat Perusahaan disalurkan melalui Dompot Dhuafa
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	25 Maret 2025



	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Baitul Maal Hidayatullah (BMH)
	Penjelasan Kegiatan	Zakat Perusahaan disalurkan melalui Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH)
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	14 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Nurul Hayat
	Penjelasan Kegiatan	Zakat Perusahaan disalurkan melalui Yayasan Nurul Hayat
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	14 November 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Baitul Maal Hidayatullah (BMH)
	Penjelasan Kegiatan	Zakat Perusahaan disalurkan melalui Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH)
	Jumlah (Rp)	Rp5.000.000

Selama tahun 2025, dana sosial yang bersumber dari zakat internal perusahaan telah disalurkan melalui beberapa lembaga, yaitu Yayasan Nurul Hayat (NH), Dompot Dhuafa, dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH).

Penyaluran dana sosial ini merupakan bentuk komitmen BPR Syariah Annisa Mukti dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan prinsip syariah.



Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi PT. BPR SYARIAH ANNISA MUKTI atas pelaksanaan kegiatan dan kinerja perusahaan selama tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, akurat, dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sidoarjo, 28 April 2026  
PT. BPRS ANNISA MUKTI



**Khaerul Hamdani S.Kom**  
Direktur Utama

**Bambang Eko Wahono, S.E**  
Komisaris Utama

**Gusti Abdurrahman, S.E**  
Komisaris